



doi: <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v11i2.16671>

Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI: Analisis Peran dan Strategi pada Masa Agresi Militer Belanda II Tahun 1948-1949

Eka Nofri Ari Yanto ^{1*}, Suyanti ², Jamin Safi ³, Sudarto ⁴

^{1,2} Universitas PGRI Madiun, Indonesia

³ Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara, Indonesia

⁴ Pendidikan Sejarah, Universitas Galuh, Indonesia

Email Correspondent: ekanoфри@unipma.ac.id

Article history: Submit 2024-10-30, Accepted 2024-12-29, Published 2024-12-30

Abstrak

Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia (RI) selama Agresi Militer Belanda II (1948-1949) merupakan sebuah babak penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Penelitian bertujuan menggali peran dan kontribusi Sultan dalam mendukung pemerintahan Republik, terutama saat Yogyakarta menjadi ibu kota negara. Dalam konteks tersebut, Sultan tidak hanya memberikan dukungan moral tetapi juga material dengan meminjamkan gedung-gedung milik kesultanan untuk keperluan pemerintahan dan membuka kas kerajaan untuk membiayai aktivitas pemerintahan RI di Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menggunakan analisis historis sebagai metode utamanya yang meliputi; koleksi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan sintesis historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap konsisten Sultan dalam memperjuangkan kedaulatan RI tidak hanya mencerminkan komitmennya sebagai pemimpin daerah, tetapi juga sebagai simbol persatuan bangsa dalam menghadapi ancaman dari luar. Perjuangan beliau pada masa itu merupakan babak penting dalam sejarah perjuangan kedaulatan Negara. Kontribusinya tidak hanya sebatas simbol-simbol belaka; ia aktif memobilisasi sumber daya, mendukung operasi militer, dan memupuk persatuan di antara rakyat Indonesia. Dengan demikian, kontribusi Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia pada masa yang krusial ini.

Kata Kunci: Sri Sultan HB IX, Kedaulatan NKRI, Agresi Militer Belanda II, Perjuangan, Peran Dan Strategi

Abstract

The struggle of Sri Sultan Hamengku Buwono IX in defending the sovereignty of the Republic of Indonesia (RI) during the Second Dutch Military Aggression (1948-1949) is an important chapter in the history of Indonesian independence. The research aims to explore the Sultan's role and contribution in supporting the Republic government, especially when Yogyakarta became the capital city. In this context, the Sultan not only provided moral support but also material support by lending buildings owned by the sultanate for government purposes and opening the royal treasury to finance the activities of the Indonesian government in Yogyakarta. The research uses a qualitative research approach, using historical analysis as its main method which includes; heuristic collection, source criticism, interpretation and historiography synthesis. The results showed that the Sultan's consistent attitude in fighting for the sovereignty of Indonesia not only reflected his commitment as a regional leader, but also as a symbol of national unity in the face of external threats. His struggle at that time was an important chapter in the history of the struggle for State sovereignty. His contribution was not limited to mere symbols; he actively mobilized resources, supported military operations, and fostered unity among the Indonesian people. Thus, the contribution of Sri Sultan Hamengku Buwono IX became one of the important factors in maintaining the existence of the Republic of Indonesia at this crucial time.

Keywords: Sri Sultan HB IX, NKRI Sovereignty, Dutch Military Aggression II, Struggle, Role and Strategy

PENDAHULUAN

Konflik Belanda-Indonesia dari tahun 1946-1949, menimbulkan ketegangan serius di politik dalam negeri Belanda yang pada akhirnya menjadi salah satu peristiwa politik yang paling memecah belah (Cochran, 2016). Indonesia yang baru saja merdeka dari penjajahan Belanda. Mencoba bangkit menuju kemandirian politik dan ekonomi meskipun masih belum stabil. Namun harus menghadapi kenyataan dan dipenuhi dengan tantangan signifikan, termasuk konfrontasi dengan Belanda yang berusaha merebut kembali koloninya. Belanda, yang telah kehilangan kontrol total atas wilayah-wilayah bekas koloni, mulai melancarkan agresi militernya untuk merebut kembali hak-haknya. Agresi Militer Belanda II, yang berlangsung antara tahun 1948 hingga 1949, merupakan tahap lanjutan upaya Belanda untuk mengambil alih kembali wilayah-wilayah yang telah dibebastugaskan. Meskipun pada akhirnya Belanda awal tahun 1949 kembali mengalami kekalahan perang, terutama karena melakukan strategi konvensional yang menggabungkan antara kekuatan militer dengan politik yang tidak realistis, melalui kedok otonomi sambil memegang kekuasaan politik dan berpikir bahwa setelah melakukan penangkapan para pemimpin akan menjamin kemenangan di pihaknya (Scholtz, 2018). Tepatnya 9 Desember 1948, ketika pasukan Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke Yogyakarta, yang saat itu merupakan pusat pemerintahan RI. Hal ini menciptakan kekosongan kekuasaan dan memicu pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi (Hilmatiar, 2015).

Pasca pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta,

wilayah ini harus menjadi tempat awal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, wilayah ini dipilih sebagai lokasi strategis untuk melanjutkan pemerintahan Republik Indonesia di tengah ancaman dari Belanda (Usmaedi, 2023). Sejak saat itu, Yogyakarta memainkan peran krusial sebagai pusat pemerintahan dan perjuangan bagi Republik Indonesia pasca-proklamasi. Meskipun menghadapi tantangan besar dari agresi militer Belanda, semangat juang rakyat di wilayah ini tetap kuat, menjadikannya sebagai titik awal yang signifikan dalam mempertahankan kemerdekaan. Apalagi setelah kembalinya pemerintahan Hindia Belanda, konflik antara Republik Indonesia dan Belanda muncul di mata masyarakat internasional. Agresi Militer Belanda II menandai fase kritis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Serangan ini menyebabkan penangkapan pucuk pimpinan RI dan lumpuhnya pemerintahan (Diah, 2012; Dewi, 2012; Pratiwi, 2016; Oktavianti, 2019). Selain itu, pasukan Belanda memulai serangan ke Yogyakarta dengan pesawat tempur Spitfire dan pesawat pembom P-51 ke berbagai wilayah dan lapangan terbang Maguwo yang akan digunakan untuk pendaratan pertama kali dilumpuhkan. Brigade Marinir Belanda menyerang Yogyakarta dengan roket serta dapat mengambil alih wilayah tersebut dengan cepat (Kahin, 1995). Meskipun mengalami tekanan berat dari Belanda, semangat perlawanan rakyat Indonesia tetap kuat, termasuk pasukan TNI dan gerilyawan, melakukan perlawanan sengit terhadap agresi ini. Jenderal Soedirman memimpin strategi perang gerilya untuk menghadapi kekuatan Belanda (Rizal, 2021; Maharani, 2014), yang akhirnya berkontribusi pada pengakuan kedaulatan Indonesia melalui

perundingan internasional pada tahun 1949.

Di tengah kekacauan ini, Sri Sultan Hamengku Buwono IX muncul sebagai pembela dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia yang gigih, terutama melihat posisi beliau ketika itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Oktavianti, 2019). Meskipun adanya pembatasan untuk beraktivitas hanya di dalam Keraton oleh pihak Belanda. Sri Sultan tidak tinggal diam dan beliau memimpin strategi di dalam Kraton, beliau akhirnya bertanggung jawab atas perlawanan terhadap Belanda. Misalnya, Letnan Kolonel Soeharto yang ditugaskan untuk memimpin Serangan Umum pada 1 Maret 1949 (Aji, & Achmad, 2017; Hutagalung, 2010). Sebenarnya, Sri Sultan hanya berbicara dengan para pejuang lainnya melalui kurir yang mengenakan pakaian abdi dalem ketika keluar masuk Keraton. Dalam konteks ini, peran beliau sebagai pemimpin monarki Yogyakarta memiliki implikasi penting dalam sejarah nasional Indonesia. Sebagai penguasa, yang menjadi ibu kota sementara Republik karena kondisi Jakarta yang tidak menentu, beliau tidak hanya memberikan dukungan logistik kepada pemerintah Indonesia, tetapi juga memainkan peran penting dan beragam dalam memobilisasi sumber daya lokal, menyatukan berbagai faksi untuk melawan kekuatan kolonial serta memastikan keberlangsungan dan efektivitas pemerintahan. Yogyakarta menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun mengalami serangan dan penangkapan pemimpin, keberadaan pusat pemerintahan di wilayah tersebut menunjukkan ketahanan dan komitmen rakyat terhadap kemerdekaan.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang merupakan raja monarki Yogyakarta, berperan sentral dalam

mempertahankan integritas geografis dan politis NKRI. Selain posisinya sebagai pemimpin lokal, dia juga aktif dalam gerakan kemerdekaan nasional. Posisi geopolitik Yogyakarta sebagai pusat administratif provinsi Jawa Tengah membuatnya menjadi target utama operasi militer Belanda. Oleh karena itu, strategi dan taktik yang digunakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam menghadapi situasi darurat ini sangat relevan untuk dikaji. Melalui diplomasi, mobilisasi rakyat, dan taktik perang gerilya, Sultan tidak hanya mempertahankan Yogyakarta tetapi juga memberikan inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan di seluruh Indonesia. Keterlibatan aktifnya bersama ulama dan organisasi masyarakat menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan besar pada masa itu. Beliau berkolaborasi dengan Sri Paduka Paku Alam VIII untuk memperkuat legitimasi pemerintah Republik di Yogyakarta (Yulianto, 2017). Sultan berperan dalam mengorganisir pertahanan rakyat dengan memanfaatkan jaringan sosial dan keagamaan untuk mobilisasi massa. Ini termasuk mengerahkan pasukan APS dan TNI untuk berjuang di front pertempuran.

Meskipun penelitian sebelumnya telah mengakui peran penting para pemimpin lokal dalam gerakan kemerdekaan Indonesia, namun masih terdapat kesenjangan yang mencolok dalam studi komprehensif yang secara khusus berfokus dan menganalisis lebih rinci serta mendetail tentang tindakan dan strategi spesifik pada kontribusi Sri Sultan Hamengku Buwono IX selama Agresi Militer Belanda Kedua (Rumintang, 2009; Windari, et al., 2021). Literatur yang ada sering kali memberikan gambaran umum atau berfokus pada tema-tema umum daripada menyelidiki secara mendalam manuver taktis dan diplomatik yang digunakan

oleh Sultan. Selain itu, karya-karya sebelumnya sering kali hanya menyoroti berbagai aspek kepemimpinannya tetapi sering kali tidak memiliki analisis terperinci, kehadiran kepemimpinan hanya simbolis atau kontribusi umumnya tanpa menyelidiki analisis terperinci tentang keputusan strategisnya dan dampaknya pada konteks perlawanan nasional yang lebih luas serta implikasinya terhadap kedaulatan Republik. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan ini dengan menawarkan pemeriksaan komprehensif dan mendalam tentang tindakan, strategi, dan signifikansi Sultan Hamengku Buwono IX bagi kedaulatan Indonesia selama periode kritis ini serta implikasinya terhadap kelangsungan hidup Republik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menyelidiki peran strategi khusus yang digunakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selama periode kritis ini atau masa penuh gejolak, mengkaji bagaimana upayanya berkontribusi pada pertahanan kedaulatan Indonesia dan pengaruhnya secara keseluruhan serta mengungkap kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran detail tentang bagaimana Sri Sultan Hamengku Buwono IX berkontribusi dalam melestarikan kedaulatan NKRI selama era konflik dengan Belanda, serta implikasi strategis dan historis dari aksinya tersebut (Fembriyanto, 2016; Iswanto, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menggunakan analisis historis

(Notosusanto, 1971; Jóhannesson, 2010; Erickson, 2011; Rukin, 2019), sebagai metode utamanya. Penelitian melibatkan langkah-langkah utama, diantaranya; Heuristik melalui pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan peristiwa-peristiwa seputar Agresi Militer Belanda II. Sumber primer melibatkan saksi mata (Muhammad, 1999). Seperti Pesan Yang Terhormat Tuan *Inkang Sinuwun Kangdjeng* Sultan Yogyakarta, Surat Pribadi Sri Sultan kepada Tuan Sudjono, dan Naskah Proklamasi Sri Sultan HB IX tanggal 30 Juni 1949 Kesaksian orang lain dan orang yang tidak hadir pada peristiwa tersebut adalah contoh sumber sekunder (Widja, 1989). Karya Ahmad Adaby Darban tentang Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX dan Sutrisno Kutoyo tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IX: Riwayat Hidup dan Perjuangan adalah contohnya. Selain itu, karya lain, seperti Suwarno, PJ (1994), tersedia. Heijboer, Pierre tentang Agresi Militer Belanda untuk Memperebutkan Zamrud yang Terpendam di Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949, dan Sri Endang Sumiyati et al. tentang Koreksi Sejarah Penyerangan 1 Maret 1949. Selain itu, mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait serta peristiwa-peristiwa seputar Agresi Militer Belanda II.

Setelah informasi sejarah terkumpulkan, proses kritik atau verifikasi sumber dengan mengevaluasi kredibilitas dan keaslian sumber melalui kritik internal dan eksternal untuk memastikan keakuratan fakta. Kritik eksternal memeriksa keaslian dan asal usul sumber, dan kritik internal membandingkan sumber untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan. Proses ini memungkinkan penulis bertanggung jawab atas keaslian data

yang digunakannya. Tahap selanjutnya, interpretasi data (Muhammad, 1999), melalui penganalisisan fakta sejarah untuk memperoleh wawasan bermakna mengenai strategi dan peran Sultan Hamengku Buwono IX. Penulis memeriksa berbagai sumber untuk memahami kemungkinan, dan kemudian menggabungkan data untuk menghasilkan fakta sejarah yang akurat. Tahap terakhir yaitu historiografi (Abdurrahman, 1999), dengan mensintesis temuan menjadi narasi koheren yang mencerminkan kompleksitas kepemimpinannya selama periode kritis ini. Melalui penggabungan temuan menjadi narasi kohesif yang mencerminkan kompleksitas kepemimpinannya selama periode kritis ini. Dengan menggabungkan pengalaman, data, dan strategi komunikasi yang efektif, pemimpin dapat menciptakan narasi kohesif yang mencerminkan kompleksitas kepemimpinan mereka selama masa kritis. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam memahami tindakan mereka tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang lain dalam menghadapi tantangan serupa. Penelitian ini memberikan gambaran terhadap kepemimpinan dalam masa krisis sering kali ditandai oleh tantangan yang kompleks dan keputusan yang sulit. Sehingga pemimpin harus mampu menavigasi situasi yang tidak pasti dan sering kali harus membuat keputusan cepat yang berdampak luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana kepemimpinan tersebut beroperasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati pada 20 Juli 1947 melalui serangan militer yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I. Perjanjian Linggarjati, yang ditandatangani pada November 1946, merupakan kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang mengakui de facto kedaulatan Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera, serta menghentikan permusuhan antara kedua belah pihak (Susilo, & Wulansari, 2021; Sari, et al., 2014). Namun, Belanda tidak menghormati kesepakatan tersebut dan melanjutkan aksi militer dengan alasan "Aksi Polisionil," yang merupakan upaya untuk merebut kembali kontrol atas wilayah Indonesia (Mahardika, 2022). Pelanggaran ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesepakatan formal, Belanda tetap berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia, yang pada akhirnya memicu konflik lebih lanjut dan perjuangan untuk kemerdekaan secara total. Setelah hal ini terjadi, Dewan Keamanan PBB turun tangan dan membentuk Komite Kantor yang Baik, terdiri atas wakil-wakil dari AS, Australia, dan Belgia. Tujuan Komite ini adalah menemukan cara menyelesaikan masalah tersebut. Komisi Tiga Negara (KTN) adalah nama lain Komisi ini. Frank Graham - Amerika Serikat, Richard Kirby - Australia, dan Paul van Zeeland - Belgia sebagai anggota KTN. Anggota tersebut kemudian berganti-ganti.

Mula-mula, mereka berusaha memahami keadaan dan kesulitan yang akan dihadapi. Untuk itu, sesuai dengan keputusan Dewan Keamanan, mereka membuat laporan yang disampaikan dan diterima Dewan Keamanan pada 14 Oktober 1947 dengan bantuan konsul dan pengamat militer. Anggota Komisi Jasa

Baik tiba di Jakarta tanggal 27 Oktober 1947. Pada saat ini, RI menolak mengadakan pertemuan dengan Belanda di Jakarta atau Yogyakarta. Republik hanya akan melakukannya di lokasi yang netral (Tobing, 1986). Sebuah kesepakatan baru dicapai di pelabuhan Jakarta pada bulan Januari 1948 di atas kapal Amerika Serikat USS Renville. Melalui perjanjian ini, diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan mendukung pengakuan kedaulatan Indonesia, meskipun Republik masih memiliki banyak wilayah di belakangnya, perjanjian ini mengakui gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai garis Van Mook, garis yang dibuat untuk menghubungkan perbatasan Belanda. Kemudian pihak Belanda menyatakan tidak lagi mengakui perjanjian tersebut, dengan alasan bahwa proses perundingan berjalan terlalu lama tanpa hasil yang memuaskan bagi mereka.

Dengan menerima perjanjian ini, RI memperoleh simpati Amerika Serikat, yang merupakan langkah penting dalam perjuangan selanjutnya untuk kemerdekaan. Perjanjian ini menjadi bagian penting dari usaha diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan di mata dunia dan merupakan langkah awal menuju pengakuan resmi kedaulatan Republik Indonesia yang akhirnya dicapai pada tahun 1949 (Majid, 2019). Secara umum, Perjanjian Renville terdiri dari tiga dokumen, yaitu:

- a) Garis demarkasi Van Mook diterima dalam perjanjian gencatan senjata.
- b) Konsep utama dari Kebijakan Renville adalah komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai dan dengan bantuan KTN.
- c) Enam pasal tambahan KTN termasuk ketentuan bahwa selama masa transisi, Belanda akan

memegang kedaulatan atas Indonesia hingga kemudian diserahkan kepada NIS (Amerika Serikat Indonesia).

Dua naskah pertama ditandatangani pada 17 Januari 1948, dan yang terakhir pada 19 Januari 1948. Bagi RI, Perjanjian ini membantu meningkatkan kekuatan militernya. Selain itu, simpati dunia terhadap RI meningkat, karena bersedia menerima petunjuk KTN yang mewakili PBB dan selalu menunjukkan sikap cinta damai. Salah satu poin utama dari perjanjian ini adalah persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, yang diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan memungkinkan penguatan posisi militer Indonesia. Hal ini juga berkontribusi pada meningkatnya simpati dunia internasional terhadap Indonesia, yang dilihat sebagai upaya mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut (Majid, 2019). Perjanjian Renville menjadi salah satu langkah penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan di tengah ancaman militer Belanda.

Menurut Notosutardjo, Perjanjian Renville terdiri dari tiga bagian, pertama adalah perjanjian gencatan senjata antara Belanda dan RI pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik bersenjata. Langkah ini bertujuan mengakhiri konflik dan menciptakan keamanan, menetapkan gencatan senjata dalam waktu 48 jam setelah penandatanganan, dengan penarikan pasukan sesuai dengan prosedur status quo. Untuk mencegah konflik lebih lanjut, wilayah baru dibentuk untuk mempertahankan status quo. Di wilayah yang tidak diduduki, polisi sipil, bersama dengan KTN, bertanggung jawab menjaga ketertiban.

Stabilitas dicapai melalui larangan sabotase dan propaganda. Secara keseluruhan, perjanjian ini meletakkan dasar bagi penyelesaian politik yang akan datang dan menanamkan harapan untuk keamanan abadi.

Kedua, perjanjian dasar politik Renville, atau Perjanjian 17 Januari 1948, menetapkan komitmen untuk menyelesaikan konflik politik di Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura berdasarkan asas Linggarjati. Perjanjian ini memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan berbicara, berkumpul, dan menyiarkan berita tanpa mempromosikan kekerasan. Hanya dengan persetujuan penuh dan sukarela dari penduduk setempat pemerintahan daerah dapat diganti. Setelah perjanjian ditandatangani, juga dilakukan persiapan mengurangi kekuatan militer secara bertahap. Reformasi ekonomi, perdagangan, dan transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, diputuskan juga penyelenggaraan pemungutan suara dalam jangka waktu enam bulan hingga satu tahun setelah penandatanganan perjanjian. Ini memberi rakyat Indonesia kesempatan memilih posisi politik mereka sendiri dalam hubungannya dengan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi RIS akan dibuat oleh dewan yang dipilih secara demokratis. Perjanjian ini juga menetapkan kerja sama antara Belanda dan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, dan federasi yang berdaulat dengan konstitusi demokratis. Ini termasuk pembentukan Uni RIS dengan Kerajaan Belanda dan bagian-bagiannya di bawah pemerintahan raja Belanda yang turun-temurun.

Ketiga, perjanjian KTN tanggal 19 Januari 1948 menetapkan dasar perundingan penyelesaian politik. Ini

mencakup penyerahan Hindia Belanda kepada Negara RIS di bawah pimpinan Keturunan Raja Belanda. Status RI adalah RIS. Sebelum konstitusi NIS diubah, pemerintah federal sementara akan memberikan negara-negara bagian perwakilan yang adil. Jika terjadi pertikaian politik selama masa transisi, KTN dapat dilanjutkan. Dalam waktu enam bulan hingga satu tahun, plebisit akan diadakan di Jawa, Sumatera, dan Madura untuk menentukan partisipasi dalam RI atau bagian lain dari NIS. Setelah batas negara bagian ditentukan, perwakilan dari masing-masing negara bagian akan berkumpul untuk membentuk konstitusi. Sesuai dengan perjanjian Linggarjati, perundingan akan diadakan untuk membangun hubungan khusus dengan NIS jika negara-negara bagian menolak konstitusi NIS.

Isi Perjanjian Renville ini merugikan RI, dan banyak orang mengecam PM Amir karenanya. Pengepungan Belanda terhadap ibu kota RI semakin ketat dengan mendirikan negara boneka di wilayah yang dikuasainya. Ini mengakibatkan jatuhnya kabinet PM Amir, yang merupakan delegasi Indonesia dalam Perundingan Renville. Karena diperlukan pemerintahan yang kuat untuk menerapkan perjanjian Renville dan karena situasi militer yang sulit karena konflik dengan Belanda dan masalah lain, kabinet baru harus dibentuk. Namun, baik Partai Masyumi maupun PNI menolak untuk menjabat sebagai pemimpin kabinet (Moejanto, 1988).

Pada akhirnya, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Hatta membentuk kabinet. Masyumi dan PNI mendominasi kabinet. Rekomendasi kabinet ini terdiri dari empat pasal;

- 1) Mengikuti ketentuan Perjanjian Renville dan melanjutkan

perundingan dengan Belanda melalui KTN;

- 2) Percepat pembentukan NIS yang berdaulat dan mandiri;
- 3) Rasionalisasi Militer;
- 4) kembali memperbaiki bekas perang dan pendudukan Jepang.

TNI, khususnya Divisi Siliwangi dipimpin Kolonel Nasution, mengalami kesulitan ketika Perjanjian Renville dilaksanakan. Sesuai dengan perjanjian garis sempadan Van Mook, pasukan Divisi Siliwangi yang tersebar di Jawa Barat harus meninggalkan wilayahnya menuju wilayah Republik. Nanti, pasukan tersebut akan berpindah ke daerah yang merupakan wilayah Divisi IV yang berpusat di Solo. Kutipan berikut menunjukkan betapa cepatnya pasukan Siliwangi berpindah:

“Kami harus mematuhi dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah! Meskipun hati kami hancur, kami pergi dan berhijrah, meninggalkan semua yang kami cintai, seperti rumah, saudara, dan teman seperjuangan di Jawa Barat. Semua yang kami cintai, selamat jalan. Sampai jumpa lagi! Kami bersumpah dengan tulus bahwa kami akan kembali, Insya Allah” (Moejanto, 1988).

Belanda tidak segera menunjuk wakilnya untuk berunding dengan RI pada pertengahan Maret 1948, sehingga perundingan melalui KTN baru dapat dilanjutkan. Penundaan ini tampaknya disengaja dan terkait dengan pembentukan wilayah Madura, Pasundan, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan yang diambil Belanda dari RI. Pembentukan Pemerintah Federal Sementara yang disponsori Belanda juga dibarengi dengan pembentukan negara-negara bagian tersebut. Karena RI terus memperluas

hubungannya dengan negara lain, Belanda menuduh RI melanggar Perjanjian Renville (Moejanto, 1988).

Belanda membentuk Majelis Permusyawaratan Federal (*Bijeenkomst voor Federale Overleg/BFO*) pada bulan Juli. Majelis ini terdiri dari para pemimpin negara bagian. Dengan atau tanpa persetujuan RI, mereka bermaksud membentuk NKRI yang federal. Menurut Ricklefs (1991), keadaan Republik Jawa pada 1948 sangat tidak stabil. Karena masuknya orang dari luar Republik yang harus ditinggalkan, kekuasaan RI semakin terbatas. Dengan blokade oleh Belanda, kesulitan semakin parah, dan penduduk juga kekurangan beras.

Karena kebuntuan, perundingan gagal berjalan. Akibatnya, KTN kembali mencoba membuka perundingan. Rencana penyelesaian yang diusulkan Merle Cochran, perwakilan AS yang baru dilantik, dikenal sebagai Rencana Cochran. Secara keseluruhan menurut Tobing, (1986), laporan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) Menjaga hubungan internasional Republik;
- b) Pemerintah Amerika Serikat mengontrol seluruh angkatan bersenjata dan perlengkapannya, termasuk Tentara Kerajaan Belanda di Indonesia;
- c) Utang Hindia Belanda kepada Belanda setelah tahun 1942 akan dinegosiasikan.

NKRI kecewa dengan usulan Cochran karena dianggap mengorbankan beberapa kepentingan RI, sedangkan Belanda tidak puas karena dianggap tidak memadai. Hasil, upaya Merle Cochran gagal. Selain itu, perundingan yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Belanda Stikker secara langsung gagal. Pada 11 Desember 1948, Belanda menolak perundingan

dengan syarat tersebut. Belanda juga menyatakan bahwa Pemerintah Federal Sementara akan tetap beroperasi tanpa menunggu partisipasi Amerika Serikat.

Hatta meminta Cochran membuka kembali perundingan pada 13 Desember 1948. Hatta menyatakan bahwa RI bersedia mengakui hak veto Komisaris Tinggi Mahkota, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan Hindia Belanda, dengan batasan tertentu. Belanda memberikan ultimatum empat hari kemudian, menuntut RI menyetujui tuntutan dalam waktu 18 jam. Selain itu, ditegaskan bahwa RI akan dimasukkan ke dalam federasi dengan status yang sama seperti negara bagian lainnya. 18 jam bukanlah waktu yang lama atau terlalu singkat bagi RI mempelajarinya. Negosiasi otomatis terhenti saat Belanda secara sepihak melanjutkan penyelesaian federal. Hal ini juga tidak akan memenuhi keinginan Belanda untuk memberikan tanggung jawab atas keamanan dalam negeri selama masa transisi. Belanda juga menawarkan opsi memasukkan tentara Indonesia ke dalam pasukan federal. Mulai terjadi ketidakpastian, yang menghasilkan situasi yang sangat penting dan berbahaya bagi gencatan senjata antara kedua belah pihak.

Tuntutan Belanda terhadap RI menjadi semakin mendesak dan kuat. Salah satu ciri kedaulatan dan kemerdekaan RI adalah kekuatan militer, Belanda ingin dibubarkannya. Mereka dengan cepat memulai perang total, bahkan saat gencatan senjata telah dicapai. Dan terus melakukan serangan ekonomi serta politik menghancurkan RI (Nasution, 1979). Pada 19 Desember 1948, Belanda mengambil tindakan militer karena ketidaksepakatan antara mereka. Agresi Militer Belanda II adalah nama serangan militer tersebut. Sekitar pukul 06.00, pesawat Belanda memulai

serangan ke Yogyakarta. Mereka menembak jatuh lapangan udara Maguwo, serta jalan raya, barak tentara, dan bangunan pemerintahan. Pasukan terjun payung Belanda dikirim (Tobing, 1986). Ibu Juariah Suhardi menggambarkan tentang serangan Belanda terhadap Yogyakarta sebagai berikut:

“TNI juga tidak menyadari bahwa Yogya diduduki Belanda saat itu. Penduduk tahu bahwa itu adalah latihan pasukan Indonesia, meskipun pesawat sudah menderu sekitar pukul enam pagi. Oleh karena itu, keadaan tidak stabil pada saat itu. Baru pukul setengah tujuh berita tentang pendudukan Belanda tiba. Ternyata parasut pasukan Belanda telah dibuang oleh mereka. Orang-orang di sana ketakutan dan banyak yang mengungsi” (13/01/2011).

Selanjutnya H. Ollot Sajiman menyatakan bahwa:

“Yogyakarta tidak menunjukkan perlawanan pada saat itu. Seluruh pasukan utama yang berbasis di Yogyakarta berada di luar kota untuk melakukan latihan perang. Beberapa regu jaga, satuan yang menjaga asrama dan kantor bersama taruna TNI yang bermarkas di Maguwo, adalah satu-satunya prajurit yang tetap berada di kota. Panglima TNI daerah Yogyakarta telah menyiapkan strategi menghadapi serangan musuh beberapa hari sebelum peristiwa militer Belanda ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, logistik di luar kota juga telah disiapkan” (22/12/2010).

Direncanakan akan dilakukan latihan perang mulai tanggal 18 Desember 1948 untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi pasukan di Yogya. Akibatnya, pada 18 Desember pagi, seluruh pasukan yang ada di Yogya

meninggalkan kota beserta seluruh perlengkapannya, kecuali pasukan pengawal. Oleh karena itu, latihan perang tersebut secara tidak sengaja telah memungkinkan TNI untuk menyelamatkan perlengkapannya, rakyatnya, dan kota Yogya dari penderitaan dan kerusakan. Mengenai hal ini, Soekarno mengatakan:

“Belanda menduduki bandara setelah bom dilepaskan selama satu jam, diselingi dengan tembakan roket dari pesawat P-51. Pesawat Spifire Amerika yang terbang rendah menghujani peluru secara merata di jalan. Pesawat-pesawat itu membuat udara Yogyakarta gelap. 1.000 pasukan terjun payung mengambil kantor pos, radio, dan membakar mobil. Tentara Republik yang hancur di Yogya ditawan” (Adam, 1984).

Pasukan Belanda beralih ke kota Yogyakarta setelah berhasil menangkap Maguwo. Meskipun tidak banyak perlawanan dari pihak Republik, perlawanan tersebut mampu memperlambat pasukan Belanda. Di kediaman Presiden Soekarno, para anggota kabinet Republik berkumpul mengadakan sidang darurat saat pasukan Belanda bergerak memasuki kota. Pukul 08:30, seluruh Korps Kopassus sudah berada di Maguwo, dan pasukan Belanda dapat memulai perjalanan menuju Yogya. Kota Yogya terletak 7 kilometer di sebelah barat Maguwo dalam perjalanan ke Yogyakarta. Jalan lama--jalan dari Solo ke Yogya--adalah yang paling penting. Jalan Wonosari-Yogya dapat diakses langsung ke pusat kota sedikit ke arah selatan lapangan terbang. Selama pergerakan ini, pasukan Belanda menggunakan kedua jalan ini. Separuh pasukan kopassus dan 1-15 RI, serta satu batalyon dari Brigade T yang baru dibentuk, menggunakan jalur utara. Pasukan kopassus yang tersisa berjalan

melalui ladang dan kota-kota di sebelah selatan lapangan terbang menuju jalan Wonosari-Yogya (Heijboer, 1998).

Soekarno di Istana Kepresidenan memutuskan untuk menyerah dengan hormat selama sidang kabinet RI. Kemudian para menteri memilih Menteri Sjafruddin Prawiranegara sebagai kepala pemerintahan darurat. Saat itu, Sjafruddin berada di Bukit Tinggi, ibu kota Republik Sumatera. Selain itu, Hatta terus memberikan pernyataan resmi tentang hal-hal yang berkaitan dengan militer. Pernyataan ini, sebagai tanggapan atas desakan Kolonel Simatupang, memberikan perintah kepada tentara melanjutkan perjuangan mereka melawan pemerintah dalam bentuk apa pun.

Dengan demikian, keputusan Sidang Kabinet menurut Djaja (2008) dan Fitria (2022) adalah sebagai berikut.

- 1) Agar dunia bersimpati dengan Republik Indonesia, Soekarno dan Hatta tetap berada di Gedung Negara sebelum Belanda menangkap mereka;
- 2) Memberikan wewenang kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara, yang sedang berada di Sumatera, untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat;
- 3) Di bawah pimpinan Panglima Tertinggi Soedirman, Tentara terus berjuang gerilya;
- 4) Sri Sultan, Menteri Koordinator Negara Bidang Keamanan, masih tinggal di kota tersebut.

Pada akhirnya, tanggal 20 Desember 1948, Soekarno harus menghadapi Jenderal Meijer, panglima pasukan Belanda di Jawa Tengah. Jenderal ini meminta agar Soekarno memberikan perintah gencatan senjata kepada TNI, tetapi beliau menolaknya

dengan tegas, menyatakan bahwa sebagai seorang tawanan, ia tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan perintah (Great, 1983). Keberanian dan ketegasan ini menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Momen ini juga menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh pemimpin Indonesia dalam mempertahankan posisi mereka di tengah tekanan militer Belanda yang terus berlanjut. Tanggal 22 Desember 1948, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tuan Assaat, Tuan Ali Sasstroamidjojo, dan Komodor Udara Suriadarma diterbangkan ke Pulau Bangka. Di sana, Soekarno, Syahrir, dan Salim terpisah dan diterbangkan ke Brastagi, lalu ke Prapat, Danau Toba (Sumatera Utara). Sebelum ditangkap, Soekarno telah memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), jika pemerintah pusat tidak dapat melanjutkan tugasnya. PDRI didirikan pada 22 Desember 1948 di Bukittinggi sebagai upaya mempertahankan eksistensi negara dan melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia meskipun dalam situasi yang sangat sulit (Hilmatiar, 2015; Elvira, 2020).

Dengan demikian, ada perbedaan pendapat tentang bagaimana mempertahankan kedaulatan NKRI. Golongan pertama diwakili Syafruddin Prawiranegara dan rekannya, yang memimpin PDRI di Sumatera. Di sana, mereka tetap berhubungan dengan TNI yang melakukan perang gerilya. TNI, di bawah pimpinan Pangsar Soedirman, melakukan perang gerilya di pedalaman dengan bantuan seluruh penduduk desa. Golongan ketiga terdiri dari diplomat, termasuk LN Palar, yang berada di luar negeri untuk berjuang secara diplomatik. Golongan berikutnya terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan penduduk Yogyakarta yang tetap berada

di ibu kota sebagai "penjaga gawang" untuk menjaga proklamasi kemerdekaan Indonesia.

1. Posisi tegas Sultan dalam Mobilisasi Sumber Daya atau Dukungan Finansial

Sementara itu, Paku Alam VIII, wakil kepala daerah, dan Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, mengundurkan diri sebagai ibu kota Republik Belanda. Ini dilakukan agar Belanda yang menguasai Yogyakarta bertanggung jawab atas apa pun yang terjadi di sana. Selain itu, beliau meminta pegawai negeri sipil membantu TNI, yang bertindak sebagai pemerintahan militer. Instruksi ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan pamong praja melakukan perlawanan gerilya di bawah pimpinannya (Soewarno, 1994). Sri Sultan Hamengku Buwono IX membuka dana kerajaan dan menyediakan fasilitas pemerintah untuk administrasi Indonesia, hal ini menunjukkan komitmennya mendukung Republik secara finansial dan logistik serta memastikan kelangsungan operasional fungsi pemerintahan di tengah keterbatasan keuangan (Iswantoro, 2020). Selama beberapa minggu berikutnya, di Jawa dan Sumatera, angkatan bersenjata Belanda, dengan dukungan angkatan udara, berhasil mengambil kembali kota-kota penting yang masih dikuasai Republik. Belanda memberi tahu dunia bahwa mereka hanya menghadapi sedikit resistance dari Republik dan bahwa orang-orang menerima pasukan mereka sebagai penyelamat. Mereka juga menyensor berita dari Indonesia, sehingga fakta sebenarnya tidak diketahui (Kahin, 1995).

Belanda mengambil alih ibu kota Republik Indonesia, TNI tengah melakukan perang gerilya, dan para pemimpin negara ditawan. Satu-satunya

anggota kabinet Indonesia yang berada di Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang wajar karena beliau adalah pemimpin adat di daerah dan tidak mungkin meninggalkan rakyatnya. Bersamaan dengan Agresi Militer Belanda, ia terakhir kali bertemu langsung dengan anggota kabinet lainnya sebelum sidang kabinet. Belanda melarang beliau bertemu dengan Soekarno dan para pemimpin lainnya sebelum mereka ditawan, dan melarang ia keluar dari wilayah istana. Ini mirip dengan ditahan di rumah oleh tentara Belanda. Berikut adalah pernyataan Sri Sultan.

“Karena Tentara Belanda sudah tiba di Kantor Pos, saya kembali ke Istana dan menunggu di sana. Sekitar pukul lima sore, komandan Belanda Kolonel Van Langen datang kepada saya dan memberikan saya peta kota Yogya dan tempat Istana dikurung dengan tinta merah. Van Langen meminta saya untuk tidak keluar dari lingkaran merah itu untuk alasan keamanan, bukan untuk kepentingan saya sendiri” (Carey, 1986).

Belanda menyatakan bahwa Keraton, Puro Pakualam, dan Kepatihan adalah wilayah kekebalan yang tidak dapat diganggu, sehingga Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam tidak dapat diganggu. Karena mereka adalah faktor utama, Belanda tidak berani mengganggu mereka. Raja-raja ini menciptakan ikatan emosional dan sosial-budaya antara penduduk setempat dan mengeksplorasi kekuatan di luar kemampuan dan ukuran masyarakat umum. Oleh karena itu, gangguan terhadap mereka akan sangat menggemparkan dan menimbulkan konflik dengan negara lain. Strategi Belanda dan pengikutnya, yaitu menghancurkan RI dengan menghancurkan Ibu Kota Yogyakarta,

telah berhasil dilaksanakan. Namun, setelah mereka menguasai kota, muncul masalah yang sangat penting: pengambilalihan pemerintahan, terutama Yogyakarta. Secara umum, menguasai pemerintahan adalah dengan memaksa pemerintahan sipil yang telah diberi kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di sinilah Sri Sultan menantang Belanda. Belanda kemudian bergantung pada Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Raja Yogyakarta, Gubernur Yogyakarta, dan menteri Kabinet Indonesia, dalam posisinya yang semakin putus asa di dunia internasional. Belanda meminta Sri Sultan untuk bekerja sama dan menjalankan pemerintahan dengan kontrol Belanda. Namun, upaya Belanda mendorong Sri Sultan untuk meninggalkan Republik Indonesia gagal.

Belanda mengirimkan utusan ke Sri Sultan Hamengku Buwono IX berkali-kali, seperti Residen EM Stok, Dr. Berkhuis dan Kolonel Van Langen, penguasa militer Yogya, serta orang Indonesia yang menduduki jabatan tinggi di Belanda, termasuk profesor Sultan Hamid II dan Husein Djajadiningrat. Bahkan tanpa pertemuan langsung, Sri Sultan memberikan tanggapan yang mengecewakan kepada mereka semua. Untuk menanggapi bujukan mereka, Sri Sultan mewakili Pangeran Prabuningrat, saudara tirinya (Poespaningrat, 2008). Ketegasan beliau menunjukkan sifat seorang negarawan sejati dan menunjukkan bahwa beliau adalah raja Jawa yang menganut prinsip *tan kena wola wali*, suatu falsafah luhur yang harus dipegang teguh oleh raja-raja Jawa. Bujukan Belanda itu datang dengan imbalan yang luar biasa, bukan hanya yang biasa. Belanda berjanji akan memberikan kekuasaan regional kepada Sri Sultan di Kedu dan Banyumas, serta beberapa wilayah di Jawa Timur. Karena bujukan tidak berhasil, Belanda

kemudian memberikan jabatan Wali Negara Super kepadanya (Mochtar, 1982) Jika Sri Sultan bersedia menerima jabatan tersebut, itu menunjukkan bahwa beliau telah memperoleh kekuasaan yang selama ini diperebutkan oleh raja-raja sebelumnya di Mataram, bahkan dengan mudah. Berbeda dengan sultan-sultan sebelumnya yang mengutamakan kekuasaan, sri sultan saat ini berbeda. Kini Belanda menyadari bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX bukanlah seorang raja yang dapat dengan mudah disuap dengan janji kekuasaan atau jabatan. Oleh karena itu, Belanda menghadapi tantangan yang signifikan dalam membangun pemerintahan boneka seperti yang telah dilakukan oleh negara lain. Belanda salah memahami sikap dan sifat Sri Sultan.

Sebelum Panglima Tertinggi Soedirman meninggalkan Yogyakarta untuk memulai perang gerilya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan Perintah Kilat Nomor 1/PB/D/48, yang memerintahkan seluruh Angkatan Perang untuk menerapkan rencana yang telah disusun untuk menghadapi serangan Belanda. Pada 19 Desember 1945, skrip Perintah Kilat segera diserahkan kepada Kapten Suparjo Rustam untuk disampaikan kepada Kadet Utoyo Kolopaking, dan memerintahkannya segera menghubungi RRI Yogyakarta menyiarkan skrip tersebut.

Komando cepat ini mengubah strategi perlawanan pasukan Republik dari perang linier menjadi perang gerilya. Untuk membangun basis perlawanan gerilya, pasukan Republik mundur dari kota ke desa-desa. Sistem pertahanan *Wehrkreise* atau lingkaran pertahanan (Nasution, 1977), digunakan sebagai perlawanan. Istilah ini berasal dari bahasa Jerman, di mana "*wehr*" berarti pertahanan dan "*kreise*" berarti lingkaran. Sebagai hasil dari sistem ini, wilayah

pertempuran terbagi menjadi lingkaran Perang Rakyat Total dan Perang Gerilya (Advice, 2002). Dalam hal ini, Yogyakarta adalah bagian dari *Wehrkreise* III, yang dipimpin Letkol Soeharto, yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, *Wehrkreise* III dibagi menjadi beberapa Sub *Wehrkreise* (SWK), yang berakhir sebagai berikut.

- a) SWK 101 di Yogyakarta dipimpin Letnan Marsudi;
- b) SWK 102 di Bantul dipimpin Mayor Sarjono;
- c) SWK 103 Gamping dipimpin Letkol Suhud;
- d) SWK 103A Godean dipimpin Mayor V. Sumual;
- e) SWK 104 di Sleman dipimpin Mayor Sukasno;
- f) SWK 105 di Yogya Timur dipimpin Mayor Sujono; dan
- g) SWK 106 di Kulon Progo dipimpin Letkol Sudarto.

TNI melakukan pertahanan gerilya sesuai dengan perintah Panglima Tertinggi Soedirman. Hal ini didukung sepenuhnya oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang memberikan perbekalan, ratusan gulden, dan lainnya kepada gerilyawan Istana untuk melindunginya. Seperti disebutkan sebelumnya, Istana adalah wilayah pertahanan yang pasukan Belanda tidak dapat masuk tanpa izin beliau. Akibatnya, para gerilyawan tampaknya cukup aman bersembunyi di dalamnya. Sri Sultan tidak hanya melindungi para gerilyawan, tetapi juga memberikan bantuan finansial kepada mereka yang kurang beruntung. Dana tersebut diberikan kepada tentara gerilya selain kepada pegawai di berbagai kementerian. Dia menyatakan dalam wawancara dengan Juariah Suhardi bahwa:

“Para gerilyawan biasanya menyerang pos-pos Belanda pada malam hari. Pada siang hari, mereka kembali ke markas masing-masing dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Pada siang hari, para gerilyawan itu seperti "hantu" dan bersembunyi di dalam Keraton, Pura Pakualaman, kompleks Taman Siswa, dan bangunan-bangunan Pangeran. Selain itu, atas izin Sri Sultan, perbekalan senjata Jepang, termasuk granat dan mesiu, disimpan di Bangsal Kencono di sebelah selatan Pagelaran Keraton. Seperti rumah-rumah para pangeran di sekitar keraton yang dipenuhi dengan gerilyawan” (13/01/2011),

Keraton Sri Sultan Hamengku Buwono IX terlihat seperti rumah bagi para pejuang yang tidak berani menghadapi serangan Belanda. Secara strategis dan politik, serangan Belanda ke Yogyakarta tidak berhasil, kata Himawan Soetanto (2006), Belanda sangat percaya bahwa mereka dapat dengan mudah menghancurkan TNI dan RI dengan serangan militer. Meskipun Belanda meningkatkan kekuatannya, TNI meremehkan kemampuan Belanda dan keinginan untuk berperang. TNI memperoleh kemenangan dalam perang gerilya. Selain itu, kondisi alam memungkinkannya.

“Beruntunglah kita, karena Allah SWT telah memberikan kita gunung, lembah, hutan, sungai, dan kekayaan alam lainnya yang membuat kita mampu bertahan dalam peperangan gerilya melawan musuh yang memiliki persenjataan yang lebih lengkap, dengan jiwa dan semangat juang yang lebih teguh dari lawan kita,” kata Panglima Soedirman dalam pidatonya di hadapan pasukan TNI (Tjkropanolo, 1992).

2. Dukungan Militer dan Inisiatif Strategis

Dengan mengusir Belanda yang sudah bercokol jauh sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, Sri Sultan menunjukkan cintanya kepada Republik. Dengan radio Istana, Sri Sultan dengan mudah mengikuti perkembangan dunia internasional, terutama masalah Indonesia di forum diplomatik PBB. Dia mendengar bahwa PBB akan mengadakan pertemuan pada akhir Februari 1949 untuk membahas masalah Indonesia-Belanda. Sejak Belanda mengambil alih Yogyakarta, Belanda telah mengatakan kepada orang-orang di seluruh dunia bahwa RI telah bubar. Setelah mendengar berita tersebut, Sri Sultan berpikir untuk mengatakan kepada orang-orang di seluruh dunia bahwa RI tidak hancur seperti yang dipikirkan Belanda, telah runtuh dan TNI juga runtuh, tetapi RI tetap kuat dengan pemerintahan darurat di Sumatera, dan TNI tetap utuh dengan berperang gerilya dengan para pemimpinnya di pedalaman.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX memainkan peran penting dalam mengorganisir dan mengatur operasi militer, terutama "Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 besar-besaran terhadap pasukan Belanda, sebuah serangan terkoordinasi yang menunjukkan ketahanan Indonesia melawan pasukan Belanda dan menegaskan kembali legitimasi Republik (Iswantoro, 2020; Aryani, 2010). Sultan terlibat langsung dalam perencanaan serangan ini, yang bertujuan menunjukkan bahwa pemerintahan RI masih ada dan berfungsi meskipun dalam kondisi terdesak akibat agresi Belanda. Ia bekerja sama dengan para pemimpin militer, termasuk Jenderal Soeharto, merumuskan strategi serangan yang efektif. Melalui koordinasi yang baik antara berbagai elemen, dan memastikan bahwa serangan dapat

dilaksanakan secara terorganisir dan terarah (Alwi, 2010; Prasetyo, 2013).

Sri Sultan mendorong para gerilyawan melakukan penyerangan yang akan mengejutkan Belanda dan mengganggu pasukan Belanda. Akibatnya, keadaan yang membuat Belanda tertekan menyebar ke dunia internasional, termasuk PBB, dengan cara yang tepat karena mempertahankan kedaulatan NKRI hanya dapat dicapai melalui diplomasi tanpa bantuan dari dorongan lain, seperti menunjukkan kekuatan militer. Strategi ini akhirnya mengarah pada SU 1 Maret 1949. Untuk mencapainya, beliau harus berkonsultasi dengan Panglima Soedirman—yang saat itu melakukan perang gerilya—sebagai langkah pertama. Selanjutnya, beliau memerintahkan sekretarisnya, Selo Sumarjan, untuk menulis surat kepada Jenderal Soedirman meminta angkatan darat untuk menunjukkan kekuatan mereka (Chidmad et al., 2001). Karena jaringan telekomunikasi tidak ada, surat ini dikirim melalui kurir. Setelah Jenderal Soedirman menyetujui dan menerima surat ini, Sri Sultan diminta berbicara dengan komandan lokal, Letkol Soeharto (Panglima Wehrkreise III).

SWK 101/Kota di dalam kota, yang bertanggung jawab mengatur pasukan dan perbekalan WK III, lebih menonjol di antara SWK lainnya. Letjen Marsoedi membagi wilayah kota menjadi enam sektor untuk meningkatkan efektivitas (SESKOAD, 1989). Letnan Marsoedi membagi kota menjadi enam distrik: (a). Sektor I terdiri dari wilayah Barat hingga Ngabean Selatan, dipimpin Letnan Wuston; Sektor II terdiri dari wilayah Timur, dipimpin Sudomo; Sektor III terdiri dari wilayah Selatan hingga Ngabean Utara, dipimpin Mochtar; dan Sektor IV, dipimpin Rakido, mencakup wilayah Secodiningratan hingga Pakualam Utara dan Malioboro Timur.

Sektor V, dipimpin Supriyadi, mencakup jalur kereta api utara hingga Tugu Timur; dan Sektor Barat. Selain itu, SWK 101 bertanggung jawab menjaga keamanan Letkol Soeharto saat dia pergi ke Istana untuk menerima perintah dari Sri Sultan. Setelah menerima surat undangan dari Sri Sultan yang mengundang Letkol Soeharto ke Istana, SWK 101 akan melakukan pengamanan dengan nama Pagar Betis. Dengan pengawasan yang ketat, Letkol Soeharto digiring oleh pemandu SWK 101 berjalan kaki melewati Desa Taman, melewati Desa Ngadisuryan di sebelah timur, dan akhirnya tiba di Preboyo. Setelah itu, Letkol Soeharto digiring menuju pintu gerbang Margoleno, berpakaian seperti para abdi dalem Kejawen. Letkol Soeharto diterima di lokasi itu dan kemudian digiring ke ruang Prabuningratan. Karena GBPH Prabuningrat menunggu di luar ruangan, Sri Sultan dan Letkol Soeharto berbicara secara pribadi selama pertemuan (Chidmad et al., 2001).

Sri Sultan meminta Letkol Soeharto melakukan sesuatu, dengan harapan pertunjukan kekuatan ini akan meningkatkan semangat juang TNI dan para pejuang serta memberi tahu dunia bahwa kekuatan Belanda tidak akan menghancurkan RI. Setelah bertemu dengan Sri Sultan, Letkol Soeharto kemudian membuat strategi penyerangan. Ini menunjukkan bahwa Letkol Soeharto bertanggung jawab untuk menerjemahkan arahan atasannya di lapangan ketika SU terjadi pada 1 Maret 1949 (Tim Lai, 2000). Serangan akan dilakukan pada siang hari, tidak seperti serangan gerilya yang biasa dilakukan pada malam hari. Selain itu, serangan akan dilakukan di berbagai lokasi secara bersamaan. Sebelum tanggal 1 Maret, pasukan Belanda menyerang beberapa pos Belanda. Mereka mengganggu jalur

telepon, kabel, rel kereta api, dan jalur komunikasi lainnya. Semua SWK bersiap untuk serangan besar. Pada 9 dan 16 Januari 1949, serta 4 Februari 1949, perintah Kolonel Bambang Sugeng—yang dalam hierarki militer bertanggung jawab atas WK III yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto—dilaksanakan dengan menyerang posisi-posisi Belanda. Wawancara dengan H. Ollot Sajiman;

“para gerilyawan sudah mulai memasuki kota malam sebelum SU 1 Maret. Mereka bersembunyi di rumah orang lain, yang memastikan mereka aman. Seluruh komunitas bersatu untuk menentang Belanda dalam apa yang disebut sebagai "bela semesta total". Bahkan dapur umum disiapkan untuk membantu logistik gerilyawan. Tampaknya tidak ada masalah bagi para pejuang untuk mendapatkan logistik makanan yang diperlukan, meskipun sistem gerilya digunakan. Namun, tindakan Sri Sultan, yang telah meminta pemerintah daerah untuk membangun gudang logistik di setiap kecamatan” (22/12/2010).

Pagi harinya, bunyi sirine yang menandakan berakhirnya jam malam yang ditetapkan Belanda terdengar bersamaan dengan tembakan yang terdengar dari seluruh kota Yogyakarta. Pasukan Belanda tidak mengantisipasi serangan, jadi mereka hanya berusaha mempertahankan diri. Mochtar, 1982: Setelah serangan yang mengerikan, pasukan Belanda meminta bantuan dari Semarang dan Magelang. Pasukan gerilya ini terdiri dari TNI, Polri, AURI, Tentara Pelajar, dan Laskar, dengan total sekitar 2000. Selain itu, kelompok WK III di sekitar Yogyakarta, seperti Kompi Suwarno dari Yon Daryatmo Muntilan dan Kompi Sudarsono dari Yon Sruharjono Purworejo, dan Peleton

Sulaksono dari Yon Sunitisiono dari WK I Divisi II/M Klaten, meningkatkan penyerangan mereka. Pasukan Belanda memasuki kota setelah mereka mundur. Setelah menduduki Yogyakarta selama kurang lebih enam jam, bantuan pasukan Belanda dari Semarang tiba pada pukul 11.00. Untuk menghindari lebih banyak korban, pasukan gerilya mundur pada pukul 13.00.

Meskipun hanya berlangsung beberapa jam, serangan ini dianggap berhasil mencapai tujuan militer, yaitu meningkatkan moral personel dan mendorong mereka berperang gerilya (Tim Lai, 2000). Kesuksesan ini memalukan Belanda, yang selama bertahun-tahun telah menyebarkan rumor bahwa RI dan TNI tidak ada lagi. Anggota KTN juga berada di Yogyakarta saat penyerangan terjadi untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Ironisnya, para anggota KTN pergi ke Yogyakarta atas permintaan Belanda, seolah-olah mereka ingin memberi tahu orang Belanda bahwa Belanda telah berhasil membunuh RI. Berita itu kemudian dikirim oleh Sri Sultan ke Bukittinggi, tempat Syafruddin Prawiranegara dan pejabat lainnya memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia setelah kemenangan itu. Dari Bukittinggi, berita itu kemudian dikirim ke Amerika Serikat melalui New Delhi. Berita tentang SU 1 Maret membuka pintu politik internasional tentang keberadaan RI. Istana menjadi tegang setelah pasukan Republik meninggalkan kota karena pasukan Belanda mulai berdatangan.

Setelah itu, pasukan Belanda datang ke istana karena mereka pikir gerilyawan bersembunyi di sana di bawah perlindungan Sri Sultan. Setelah tank Belanda menghantam salah satu pintu gerbang istana, komandan pasukan memaksa bilau untuk bertemu komandan.

Panglima pasukan Belanda di wilayah kota Yogyakarta saat itu, kolonel Van Langen, langsung menuduh beliau bahwa ada tembakan atau serangan dari dalam Keraton. Namun, beliau menolak tuduhan tersebut. Beberapa hari kemudian, terdengar tembakan keras dari sebuah tank di depan rumah GBPH Prabuningrat, yang dekat dengan pintu masuk Keraton. Jenderal Meijer, Panglima Teritorial dan Panglima Pasukan Belanda di Jawa Tengah, mengirimkan surat permintaan kepada Kapten de Jonge, yang berfungsi sebagai ajudan Kolonel van Langen, untuk mengatur pertemuan dengan Sri Sultan. Di bawah pengawasan pasukan lapis baja, jenderal Meijer dan rombongan menemui Sri Sultan. Kolonel DBA van Langen, yang bertindak sebagai Panglima pasukan Belanda di Yogyakarta; Dr. Angenen, Stok, yang bertindak sebagai Residen di Yogyakarta; dan Kapten de Jonge, yang bertindak sebagai asisten van Langen. Pada pertemuan tersebut, Sri Sultan diminta menghentikan sikap anti-Belandanya dan mendukung gerilyawan. "Yogyakarta sudah tertib sebelum Belanda datang," jawab beliau. "Kalau sekarang kacau, kenapa harus saya yang membereskannya?" tegasnya. "Kalau tuan-tuan mau memperlakukan Keraton seperti ketika arsip saya dirampas tentara Belanda di Kepatihan, lebih baik saya dibunuh saja" (Poespaningrat, 2008).

Jenderal Meijer dan rombongan terkejut ketika mereka mendengar ketegasan Sri Sultan. Beberapa menit kemudian, mereka dengan sopan meminta izin setelah sebelumnya bersikap sombong dan angkuh. Sri Sultan dapat meredam mereka setelah perdebatan yang keras. Itu adalah pengalamannya saat dia kuliah di sebuah klub debat di Leiden. Setelah agresi Belanda dan pendudukannya di Yogyakarta, keberhasilan SU 1 Maret

1949 membangkitkan kembali kepercayaan rakyat kepada TNI dan membuat orang percaya pada kemampuan dan kekuatan TNI secara psikologis. Ini adalah apa yang diperlukan untuk mempertahankan semangat perjuangan rakyat dan mempertahankan persatuan melawan Belanda (Widodo, 1988). Untuk membalas dendam atas kejadian memalukan itu, Belanda menyerang posisi para pejuang tanpa pandang bulu di Wonosari, Gunung Kidul. 20 pesawat DC-3 dari Lapangan Andir, Bandung, membawa pasukan terjun payung ke Bandara Gading, Gunung Kidul. Meskipun demikian, tidak ada hasil karena pejuang tidak ada lagi di daerah itu (Widodo, 1988). Belanda membersihkan kota dan desa sementara para pejuang terus menyerang.

Setelah PBB mengetahui tentang serangan pada 1 Maret, Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) meminta Belanda segera menghentikan kekerasan di Jawa dan Sumatera. Ini menunjukkan bahwa propaganda Belanda yang bertujuan menghancurkan RI salah. Kekuatan militer RI dan kekuatan politiknya sekarang menjadi perhatian masyarakat internasional. India, Burma, Mesir, Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan DK-PBB mulai menempatkan Belanda di bawah tekanan. Sekarang Belanda menghadapi masalah yang pasti akan menghalangi upayanya untuk mencapai tujuannya. Tekanan ini meningkat setelah DK-PBB mengeluarkan resolusi baru yang disebut "Proposal Kanada", yang dipilih dengan mayoritas delapan suara, termasuk AS, menurut Kahin (1995) mencakup hal-hal berikut:

- a) Mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta;
- b) Menghentikan gerilya militer Belanda dan Republik;

- c) dimulai dengan konferensi Den Haag untuk mencapai kesepakatan akhir.

Terjadi perundingan antara RI dan Belanda untuk menerapkan keputusan tersebut. Perundingan Roem-Roijen adalah perundingan di mana Moh. Roem dan DRJH van Roijen mewakili RI. Sebagai dasar perundingan, Belanda bersedia mengembalikan pemimpin RI ke Yogyakarta dan memberikan RI kedaulatan. Presiden Soekarno meminta Sri Sultan mengambil alih pemerintahan Yogyakarta dengan Keputusan Presiden yang dikeluarkan di Bangka pada 1 Mei 1949. Selanjutnya, membangun kembali Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menata kembali pemerintahan RI di Yogyakarta. Selain itu, beliau diberi wewenang mengawasi penarikan pasukan Belanda dan menyiapkan penyambutan kembali para pemimpin RI yang ditawan, termasuk kedatangan Panglima Soedirman dari perang gerilya.

Selain itu, saat KRT. Jatiningrat, SH. diwawancarai, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi 30 Juni 1949 menyiarkan salinannya dari Proklamasi Sri Sultan HB IX, yang berbunyi:

“Sri Sultan kemudian mengeluarkan Proklamasi 30 Juni 1949 setelah pasukan Belanda berangsur-angsur mundur. Tujuan proklamasi adalah untuk menghindari kekosongan pemerintahan sebelum Soekarno-Hatta dan para pemimpin lain kembali ke Yogyakarta. Selain itu, proklamasi 30 Juni 1949 bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang di Yogyakarta tetap mendukung Republik Indonesia dan bersatu dengan Republik Indonesia”.

Kesuksesan ini, tentu saja, hasil dari upaya nasional untuk mengeluarkan Belanda dari wilayah RI. Prajurit dan rakyat sipil menggunakan strategi bela

gerilya semesta dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan yang telah lama mereka harapkan. Persatuan laskar rakyat seperti ikan dan air, menurut Marsoedi.

“Orang-orang sipil sekali lagi menjadi korban pertama musuh. Di tengah kekuatan musuh, Sri Sultan juga memilih beberapa orang untuk tinggal di Istana. Mereka terus melawan Belanda, dan upaya Belanda untuk menarik Sri Sultan gagal” (Marsoedi, 1987).

Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan tokoh penting di antara tentara dan rakyat yang bersatu, karena peran pentingnya dalam menjaga kedaulatan negara ini. Strategi-strategi ini secara kolektif menunjukkan bagaimana beliau secara efektif memanfaatkan kedudukannya mempertahankan kapasitas operasional pemerintah Indonesia sambil melawan agresi eksternal. Dalam persiapan serangan, Sultan menggerakkan sumber daya lokal untuk mendukung operasi militer. Ia memanfaatkan jaringan sosial dan kekuasaan politiknya untuk menggalang dukungan masyarakat. Hal ini termasuk penggalangan dukungan finansial dan logistik dari masyarakat serta penggunaan fasilitas kerajaan sebagai tempat persembunyian bagi pasukan RI yang terdesak. Beliau berfungsi sebagai simbol persatuan bagi rakyat Yogyakarta. Dengan kepemimpinannya, ia mampu menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan penduduk lokal, mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam perjuangan. Pidato-pidatonya yang inspiratif dan ajakan untuk bersatu melawan penjajah sangat memotivasi rakyat untuk ikut serta dalam serangan tersebut. Sultan memberikan perlindungan kepada pejuang Republik

dengan menyediakan tempat persembunyian di keraton Yogyakarta. Ini menunjukkan komitmennya melindungi para pejuang kemerdekaan sekaligus menegaskan posisi kesultanan sebagai bagian integral dari perjuangan nasional (Aryani, 2010). Tindakan ini tidak hanya melindungi pejuang tetapi juga memperkuat legitimasi Sultan sebagai pemimpin yang pro-republik.

Strategi-strategi ini secara kolektif menggambarkan bagaimana Sultan Hamengku Buwono IX secara efektif memanfaatkan posisinya untuk mempertahankan fungsi pemerintahan sambil melawan agresi eksternal. Kepemimpinannya tidak hanya mendukung upaya militer tetapi juga mengilhami persatuan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia. SU 1 Maret 1949 berhasil menarik perhatian internasional dan menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan terdesak, pemerintah RI masih memiliki kekuatan dan dukungan rakyat. Keberhasilan ini memberikan dorongan moral bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menegaskan posisi Sultan sebagai salah satu tokoh kunci dalam mempertahankan kedaulatan NKRI (Iswantoro, 2020). Keberhasilan SU 1 Maret 1949 tidak hanya dilihat dari hasil taktisnya, tetapi juga dari dampak jangka panjangnya terhadap warisan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Ia dikenang sebagai pemimpin yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk tujuan bersama—mempertahankan kemerdekaan Indonesia—serta sebagai tokoh yang berhasil menjembatani antara nilai-nilai tradisional dan aspirasi modern bangsa.

3. Kepemimpinan Politik dalam Upaya Persatuan

Sri Sultan Hamengku Buwono IX bertindak sebagai tokoh pemersatu,

menggalang dukungan di antara penduduk lokal dan menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat melampaui identitas daerah. Sebagai Sultan Yogyakarta, beliau memiliki posisi yang kuat dan dihormati di kalangan masyarakat. Legitimasi ini memudahkannya memobilisasi dukungan rakyat dan menggalang kekuatan untuk menghadapi penjajahan. Sultan berperan aktif dalam pemerintahan RI, bekerja sama dengan pemimpin nasional seperti Soekarno dan Hatta. Keputusan-keputusan strategis yang diambil sering kali melibatkan masukan dari Sultan, mengingat pengaruhnya dalam konteks lokal. Beliau memberikan kontribusi penting dalam pengambilan keputusan strategis selama situasi darurat. Melalui kepemimpinannya yang kuat, pengorganisasian pertahanan, diplomasi efektif, dan mobilisasi masyarakat, beliau tidak hanya memperkuat posisi Yogyakarta sebagai pusat perjuangan tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Pengaruhnya tetap dikenang sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dalam menghadapi agresi militer Belanda, Sultan mengorganisir pertahanan kota Yogyakarta dan sekitarnya. Beliau mendorong pembentukan pasukan lokal, termasuk Askar Perang Sabil (APS), untuk melawan penjajah secara langsung. Beliau terlibat dalam penyusunan rencana taktis untuk pertempuran, termasuk penggunaan taktik gerilya yang memanfaatkan pengetahuan lokal mengenai medan perang. Ini memungkinkan pasukan Indonesia melakukan serangan mendadak dan menghindari konfrontasi langsung dengan kekuatan Belanda yang lebih besar. Selain itu, berperan dalam upaya

diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara asing, untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Ketika situasi semakin mendesak, Sultan turut serta dalam perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Republik. Pendekatan diplomatiknya membantu menciptakan kesepakatan yang lebih baik bagi Indonesia dalam menghadapi tekanan Belanda.

KESIMPULAN

Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selama Agresi Militer Belanda Kedua ditandai dengan tindakan tegas yang berdampak signifikan terhadap upaya Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan. Kemampuannya memobilisasi sumber daya, mendukung inisiatif militer, dan bertindak sebagai pemimpin politik menggambarkan peran pentingnya dalam mempertahankan Republik dari agresi kolonial. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemimpin lokal dalam membentuk narasi nasional dan menyoroti bagaimana warisan Sultan Hamengku Buwono IX terus menginspirasi diskusi kontemporer tentang kepemimpinan dan patriotisme di Indonesia. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi analisis komparatif dengan pemimpin daerah lain untuk memperkaya pemahaman tentang gerakan kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selama Agresi Militer Belanda II ditandai dengan tindakan tegas yang secara signifikan mendukung upaya Indonesia memperoleh kedaulatan. Melalui pengelolaan sumber daya yang cermat, kepemimpinan politik yang

efektif, dan inisiatif militer yang strategis, dan memastikan operasi pemerintah Indonesia yang berkelanjutan bahkan dalam menghadapi rintangan yang sangat besar. Strategi yang diterapkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam mengorganisir Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak hanya berhasil secara militer tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang visioner. Ia menunjukkan bahwa otoritas tradisional dapat berkontribusi secara signifikan terhadap cita-cita republik modern, menciptakan sinergi antara warisan budaya dan kebutuhan zaman baru dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Logos Wacana Ilmu.
- Adams, C. (1984). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Gunung Agung.
- Agung, I. A. A. G. (1983). *Renville*. Sinar Harapan
- Aji, K. B., & Achmad, S. W. (2017). *Soedirman: riwayat hidup, perjuangan, dan kisah cinta sang jenderal*. Araska Publisher.
- Alwi, Akhmad. (2010). *Peranan Hamengku Buwono IX dalam perjuangan awal kemerdekaan republik Indonesia (1945-1949)*. e-thesis - doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aryani, F. (2010). *Peran Kepemimpinan Politik Sri Sultan Hamengku Buwono IX Dalam Demorasasi Di Indonesia*. Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
<http://eprints.undip.ac.id/26996/>
- Astuti, S. R. (2002). Peranan Sub Wehrkreise 105 pada Masa Perang Kemerdekaan Kedua di DIY :

Yanto, E.N.A., Suyanti., Safi, J., Sudarto. (2024). Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI: Analisis Peran dan Strategi pada Masa Agresi Militer Belanda II Tahun 1948-1949. *Jurnal Artefak*, 11 (2), 307-330

- Suatu Kajian Sejarah Lisan. *Patra Widya*, 7(2)
- Carey, P. (1986). *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah*. Gramedia.
- Chidmad, T., Sumiyati, S. E., & Hartono, B. (2001). *Pelurusan Sejarah Serangan 1 Maret 1949*. Media Pressindo.
- Cochran, S.T. (2016). The Netherlands in Indonesia (1946–1949). In: *War Termination as a Civil-Military Bargain*. Palgrave Macmillan, New York. doi: https://doi.org/10.1057/9781137527974_5
- Darban, A. A. (1998). *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX*. Depdikbud.
- Dewi, B. (2012). *Peranan Sri Paku Alam VIII pada masa agresi militer Belanda II di Yogyakarta Tahun 1948-1949*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Diah, I. (2012). *Monumen Setu Legi Sebagai Saksi Sejarah Agresi Militer Belanda II (1948-1949) Di Yogyakarta Khususnya Di Desa Argomulyo*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Djaja, Wahyudi. (2008). *PDRI*. Klaten: Cempaka Putih.
- Elvira, M. (2020). Wajah Bukittinggi dan Riwayat Masa Silam Sebuah Kota. *Jurnal: Analisis Sejarah*, 9(1).
- Erickson, F. (2011). A history of qualitative inquiry in social and educational research. *The Sage handbook of qualitative research*, 4, 43-59.
- Fembriyanto, A. (2016). *Peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Bidang Sosial Politik 1945-1950*. Prodi Pendidikan Sejarah UPY. <https://repository.upy.ac.id/1224/>
- Fitria, M. P. (2022). Peranan Syafruddin Prawiranegara Dalam Mempertahankan Eksistensi Masa PDRI 1948-1949. *HISTORIA VITAE*, 2(2), 1-11. doi: <https://doi.org/10.24071/hv.v2i2.5248>
- Heijboer, P. (1998). *Agresi Militer Belanda Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949*. Grasindo.
- Hilmatiar, Kharismulloh. (2015). Konsep darurat negara dalam perspektif fiqh siyasah dan hukum tata negara studi kasus terhadap pemerintahan pemerintah darurat Republik Indonesia tahun 1948-1949. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(2), 259-286. doi: <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i2.2832>
- Hutagalung, B. R. (2010). *Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam kaleidoskop sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia*. LKIS Pelangi Aksara.
- Iswantoro, I. (2020). Peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam menegakkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 158-181. doi: [10.30829/juspi.v3i2.5601](https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.5601)
- Jóhannesson, I. Á. (2010). The politics of historical discourse analysis: A qualitative research method?. *Discourse: Studies in the cultural politics of education*, 31(2), 251-264. doi: <https://doi.org/10.1080/0159630103679768>
- Kahin, G. M. (1995). *Nationalism and Revolution In Indonesia*. UNS Press dan Pustaka Harapan.
- Kutoyo, S. (1996). *Sri Sultan Hamengkubuwono IX: Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Mutiara Sumber Widya.
- Mahardika, M. D. G. (2022). Agresi Militer Belanda di Wilayah Batu Pujon 1947-1948: Sebuah Kajian Sejarah Lokal. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 71-83.
- Maharani, N. (2014). *Peranan masyarakat dusun Kemusuk pada*

Yanto, E.N.A., Suyanti., Safi, J., Sudarto. (2024). Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI: Analisis Peran dan Strategi pada Masa Agresi Militer Belanda II Tahun 1948-1949. *Jurnal Artefak*, 11 (2), 307-330

- masa agresi militer Belanda II di Yogyakarta tahun 1948-1949*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Majid, A. (2019). *Perjuangan jalur Diplomasi: Sejarah perundingan Linggarjati (1946-1949)*. e-thesis - Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Marsoedi, C. H. (1987). Peranan Militer dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI di DIY. *MSI Cabang Yogyakarta Dan BPSNT*.
- Mochtar, K. (1982). *Pak Sultan dari Masa ke Masa, dalam Atmakusumah (Peny), Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Sultan HB IX*. PT. Gramedia.
- Moedjanto, G. (1988). *Indonesia Abad Ke-20 II*. Kanisius.
- Nasution, A. H. (1977). *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 9*. Angkasa.
- Nasution, A. H. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II*. Disjarah dan Angkasa.
- Notosusanto, N. (1971). *Norma-norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah*. Dephankam.
- Notosutardjo. (1956). *Konperensi Meja Bundar-KMB*. Penerbit Endang.
- Oktavianti, T. (2019). Peran Paku Alam VIII dalam pemerintahan militer daerah istimewa Yogyakarta tahun 1949–1950. *Ilmu Sejarah-SI*, 4(1). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Parrera, F. M. (1991). Ketokohan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Reformator Budaya dan Perintis Orde Baru. *Prisma*.
- Poespaningrat, P. (2008). *Kisah Para Leluhur dan yang Diluhurkan dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru*. PB. Kedaulatan Rakyat.
- Pranoto, S. W. (2002). *Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia 1946-1949*. Kanisius.
- Pranoto, S. W. (2010). Enam Jam di Yogyakarta 1 Maret 1949 Mitos atau Sejarah? *DISJARAH AD*.
- Prasetyo, Okta. (2013). *Peranan Sri Sultan Hamengku Buwana IX Dalam Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta*. e-thesis - doctoral dissertation, Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4605>
- Pratiwi, S. N. (2016). Peranan Sub Wehrkreise 101 Yogyakarta Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia Kedua (1948-1949). *Ilmu Sejarah-SI*, 2(1). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ricklefs, M. C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Gadjah Mada University Press.
- Rizal, R. (2021). Peran jenderal Soedirman dalam perang griliya (studi historis masa agresi militer Belanda II tahun 1948-1949 di Jawa Tengah). *Danadyaksa Historica*, 1(1), 12-24. doi: <https://doi.org/10.32502/jdh.v1i1.3593>
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Rumintang, L. (2009). *Bekerja sebagai diplomat*. PT Penerbit Erlangga Mahameru.
- Sari, D. I., Syah, I., & Basri, M. (2014). Tinjauan Historis Implementasi Isi Perjanjian Linggarjati Indonesia dan Belanda Tahun 1946-1947. *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, 2(4).
- Scholtz, L. (2018). The Dutch strategic and operational approach in the Indonesian War of Independence, 1945–1949. *Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies*, 46(2), 1-27. doi: 10.5787/46-2-1237
- Seskoed. (1989). *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta Latar*

Yanto, E.N.A., Suyanti., Safi, J., Sudarto. (2024). Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI: Analisis Peran dan Strategi pada Masa Agresi Militer Belanda II Tahun 1948-1949. *Jurnal Artefak*, 11 (2), 307-330

Belakang dan Pengaruhnya. Citro Lamtoro Gung Persada.

Soetanto, H. (2006). *Yogyakarta Jendral Spoor Versus Jendral Sudirman*. Gramedia Pustaka.

Soewarno, P. J. (1994). *Hamengku Buwana IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1947*. Kanisius.

Susilo, A., & Wulansari, R. (2021). Perjanjian Linggarjati (diplomasi dan perjuangan bangsa Indonesia tahun 1946-1947). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1), 30-42.

Tim Lai. (2000). *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1959*. Media Pressindo.

Tjkropanolo. (1992). *Jenderal Sudirman: Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia*. Surya Persindo.

Tobing, K. M. L. (1986). *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Renville*. Gunung Agung.

Usmaedi, U. (2023). Oeang Republik Indonesia daerah Banten sementara (ORIDABS): sejarah dan peranannya dalam perekonomian daerah Banten 1947-1948. *KALA MANCA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(2), 51-61. doi: <https://doi.org/10.69744/kamaca.v11i2.212>

Widja, I. G. (1989). *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Depdikbud.

Widodo. (1988). Peranan Serangan Umum 1 Maret 1949 Terhadap Tegaknya Pemerintahan RI. *Makalah Ceramah, 12 April 1988 Di BKSNT*.

Windari, S., Nawawi, I., Anggela, W. C., Musta'id, A., Febriyani, H. N., Syarifah, H., ... & Rohim, B. (2021). *Sejarah Islam Lokal: Tokoh, Pendidikan Islam, dan Tradisi*. CV. Idea Sejahtera.

Yulianto, A. E. (2017). Keterlibatan ulama muhammadiyah dalam

revolusi fisik di Yogyakarta tahun 1945-1949. *Ilmu Sejarah-SI*, 2(5). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Yanto, E.N.A., Suyanti., Safi, J., Sudarto. (2024). Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI: Analisis Peran dan Strategi pada Masa Agresi Militer Belanda II Tahun 1948-1949. *Jurnal Artefak*, 11 (2), 307-330